

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

6.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut

Rekomendasi BPK periode tahun 2018-tahun 2019 secara keseluruhan telah ditindaklanjuti oleh setiap SKPD yang disebutkan dalam rekomendasi. Namun terdapat beberapa rekomendasi yang berstatus dalam proses, rekomendasi tersebut berkaitan dengan temuan keuangan yang sifatnya pengembalian kepada Negara/Daerah. Dan rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti merupakan temuan yang bersifat administrasi.

Kabupaten Manggarai belum sepenuhnya bisa menindaklanjuti semua rekomendasi BPK sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh BPK yaitu selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Untuk progres tindak lanjut sendiri, pada tahun 2018 Kabupaten Manggarai telah mencapai progres 66,67% sedangkan di tahun 2019 progres tindak lanjut ini telah mengalami peningkatan menjadi 72,73%. meskipun belum mencapai target yang ditentukan oleh BPK, peningkatan progres ini, menjadikan Kabupaten Manggarai berhasil memperoleh penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

6.1.2. Kendala/hambatan

- a. Unit kerja/perangkat Daerah penanggungjawab belum konsisten secara optimal dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

- b. Pihak ketiga/rekanan yang sudah meninggal/pensiun/tidak diketahui alamatnya, yang bertanggungjawab secara materil atas rekomendasi dari BPK RI.
- c. Belum ada sanksi yang tegas terhadap kepala unit kerja/kepala perangkat penanggungjawab yang lalai atau tidak optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maupun rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal Pemerintah.

6.1.3. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai

- a. Mencari informasi nama dan alamat yang bersangkutan supaya dapat mempertanggungjawabkan setiap kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum, dan diproses sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- b. Memberlakukan sanksi yang tegas sesuai dengan UU yang berlaku kepada setiap pegawai yang tidak konsisten dalam menyelesaikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi guna mengurangi dampak rekomendasi yang berstatus dalam proses.

6.2. Saran

6.2.1. Untuk Pemerintah Kabupaten Manggarai

- a. Mempercepat penyelesaian tindak lanjut dengan memaksimalkan sumber daya dan fasilitas yang ada.
- b. Memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang tidak komitmen dalam menangani pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK.

- c. Berupaya mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan TLHP dengan meningkatkan koordinasi yang baik dengan pihak terkait atau penanggung jawab temuan.
- d. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan tim teknis SOP TLHP BPK RI dengan mengikutsertakan dalam pelatihan dan bimbingan teknis terkait penanganan tindak lanjut.
- e. Menambah personil atau pegawai yang secara khusus terlibat dalam penanganan tindak lanjut.

6.2.2. Untuk Peneliti selanjutnya.

- a. Disarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian yang sama di pemerintah Kabupaten/kota di seluruh Indonesia agar dapat mengetahui transparansi pengolahan keuangan Negara.
- b. Disarankan untuk menambah tahun pengamatan penelitiannya supaya hasil yang diperoleh dapat lebih baik.
- c. Disarankan untuk dapat melibatkan pihak-pihak eksternal diluar pemerintah seperti BPK selaku pemeriksa untuk dapat melihat permasalahan yang lebih rinci dalm pengolahan keuangan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ditto Aditia Darma Nasutio, Puja Risqi (*Audit Sektor Publik*)
- Ramadhan, Mika Debora Br. Barus (*Audit Sektor Publik*)
- Prof.Dr. Hj.Winwin Yadiati, SE.,M.SI.,Ak.,C.A, Abdullah Mubarok, SE.,MM.,Ak.,C.A(*Kualitas Laporan Keuangan: Kajian Teoritis dan Empiris*)
- Bambang Wahyudiono, SE.,MM.,QIA (*Laporan Keuangan*)
- Ferra Pujiyanti, S.Pd, Mardiah (2015) *Laporan Keuangan Akuntansi Dasar*.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 01 Tahun 2007 tentang *Standar Pemeriksaan keuangan Negara*
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 01 Tahun 2017 tentang *Standar Pemeriksa Keuangan Negara*
- Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang- Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Undang – Undang No.15 Tahun 2006 Tentang *Badan Pemeriksa Keuangan*.
- <https://www.manggaraikab.go.id>
- <https://e-ppid.bpk.go.id>
- Sisilia Amelia Essing¹ , David P. E. Saerang² , Linda Lambey³ (*Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud*).
- Beta Christy Apriliana Putri (2013) (*Pengaruh Tingkat Penyelesaian Rekomendasi BPK Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan instansi Pemerintah*)
- FeraTresnawati¹R. Nelly Nur Apandi² (2016)(*Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kementerian/Lembaga Republik Indonesia)*)

- Akmal. 2006. Pemeriksaan Intern (Internal Audit). PT. INDEKS Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Audit Sektor Publik 2010, Dito Aditia Darma Nasution, Puja Rysqi
- Bungin Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu
- Tugiman Hiro. 1997. Standar Profesional Audit Internal. Kanisius. Yogyakarta.
- Usman H. 2013. Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Edisi Ke Empat. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Tahun 2018 dan 2019. Badan Pemeriksa Keuangan RI. Jakarta.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No 1 tahun 2017, tentang standar audit pemeriksaan keuangan Negara.
- Tesis Analisis Peran Manajemen Dalam Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Oleh Satuan Pemeriksa Intern di RSUP Sanglah.
- Sugih Sutrisno Putra, Mulki Fajriana Sentosa, Analisis Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Bandung Barat.